

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA

¹Rusnywaty Yalensy Ninef, ²Supri Harton, ³Achuluddin Ibnu Rochim.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email:

¹ninefrusny@gmail.com, ²suprihartono@untag-sby.ac.id, ³didin@untag-sby.ac.id

Abstrak

Peraturan standart operasional yang telah ditetapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dengan menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan. Dan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengukur peran dari Dinas Lingkungan Hidup digunakanlah teori peran dari Iyas Yusuf sebagai dasar untuk menganalisis penerapan yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan TUPOKSI sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan namun dalam penelitian ditemukan bahwa kebijakan yang jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pemerintah juga menggunakan beberapa cara yang dinilai efektif yaitu denga melakukan sosialisasi, kerja bakti serta menerapkan pengelolaan sampah dengan metode (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan maksud penanganan sampah yang terdiri dari tiga unsur yaitu, "Mengurangi", "Menggunakan ulang" dan "Mendaur ulang" sampah (dikenal sebagai 3R).

Kata Kunci: Peran, Kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup.

Abstract

Operational standard regulations that have been stipulated at the Surabaya City Environment Service, namely by considering that in order to realize the implementation of public services in accordance with the principles of good governance, and in order to realize certainty of the rights and obligations of various parties related to service delivery, every public service provider must set service standards. And in order to provide a reference in assessing performance measures and the quality of service delivery in question, it is necessary to stipulate service standards for the Environmental Service with a Decree from the Head of the Environmental Service. To measure the role of the Environmental Service, the role theory of Iyas Yusuf is used as a basis for analyzing the implementation carried out by the Environmental Service. This research uses a type of qualitative research in the form of descriptive. The results obtained from this study indicate that the Environmental Service government has implemented TUPOKSI in accordance with Regional Regulation No. 1 of 2019 concerning Waste Management and Cleanliness, but in research it was found that the policies implemented by the Environmental Service were in accordance with applicable procedures, the government also used several ways that are considered effective, namely by socializing, community service and implementing waste management with the method (Reduce, Reuse, Recycle) are the intentions of handling waste which consists of three elements, namely, "Reduce", "Reuse" and "Recycle" waste (known as the 3R).

Keywords: Role; Policy; Environmental Service.

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan saat ini merupakan masalah yang sangat kompleks dimana lingkungan saat ini sangat bergantung pada cara hidup manusia, Hal-hal yang semakin lama semakin menurun baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Kondisi lingkungan juga semakin memusingkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Masalah lingkungan saat ini yang sulit untuk diatasi adalah masalah sampah. Limbah dibuang atau dibuang bahan yang, sebagai akibat dari aktivitas manusia atau alam, telah kehilangan unsur-unsur penting atau fungsi utamanya dan tidak lagi dapat digunakan. Semua aktivitas manusia menghasilkan limbah atau produk limbah. Sumber sampah biasanya berasal dari tempat atau lingkungan seperti rumah, pertanian, perkantoran, pasar, pabrik, rumah sakit, dll. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan konsumsi manusia terhadap barang atau bahan yang digunakan sehari-hari (Sejati, 2013).

Saat ini sampah seolah disepelekan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan aktivitas kehidupan sehari-hari, namun sampah ini juga memiliki banyak dampak negatif yang dapat terjadi atau dampak buruk yang ditimbulkan. Contohnya adalah degradasi lingkungan, Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, timbulan sampah semakin meningkat. Selain itu, pola konsumsi masyarakat berkontribusi terhadap munculnya berbagai jenis sampah, termasuk kemasan. Bahan limbah yang sangat sulit terurai membutuhkan waktu ribuan tahun untuk hancur.

Saat ini, negara berkembang seperti Indonesia masih harus berjuang keras untuk menangani masalah sampah. Kegiatan pengelolaan sampah untuk mengurangi penumpukan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan penduduk setempat (Pradana & Nugroho, 2018).

Untuk memahami penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran. Teori pembagian peran adalah salah satu solusi pertama untuk memecahkan masalah sampah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kota Surabaya dan bertujuan untuk menganalisis peran dinas lingkungan dalam meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah. Standar dan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Menurut Iyas Yusuf (2014:05) dalam (Hadya, 2020)), peran pemerintah dalam perspektif pemberdayaan yaitu membimbing masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan untuk menghasilkan kekayaan, tidak serta merta tidak ditanggung oleh Membangun masyarakat memerlukan peran pemerintah yang optimal dan mendalam. Oleh karena itu, peran pemerintah yang dimaksud meliputi:

- a. Pemerintah sebagai Regulator
- b. Pemerintah sebagai Dinamisator
- c. Pemerintah sebagai Fasilitator.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi, lokasi penelitian berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dan waktu penelitian selama satu bulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk

memberikan bukti nyata di lapangan. Penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah langkah yang dilakukan untuk menggambarkan fakta atau situasi atau keadaan yang timbul dalam masalah yang diteliti. Menurut Dhanim (2002), kualitatif juga berarti konstruktivisme, yang menganggap bahwa realitas memiliki banyak dimensi interaktif. Ini juga dapat diartikan sebagai upaya berbagi pengalaman sosial yang dapat didefinisikan oleh temuan penelitian. Penelitian kualitatif dengan demikian dapat menghasilkan dan memproses data deskriptif. B. Dengan menyusun pedoman, wawancara, dan dokumen, kami berasumsi bahwa kebenaran itu dinamis dan dapat ditemukan dengan mempelajari orang melalui interaksi mereka atau situasi sosial seperti yang tertulis (Salmaa, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik Menurut Yohan (2017), kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Definisi kebijakan publik yang berbeda oleh para ahli mencoba untuk mendefinisikan kebijakan publik dari perspektif yang berbeda. Topik ini menjelaskan definisi ini secara terpisah.

Meskipun terdapat persamaan dan perbedaan dalam definisi yang berbeda, namun semuanya menunjukkan hubungan yang sangat erat antara politik dan administrasi negara, serta mematahkan dikotomi politik-administratif yang tercermin dalam hubungan sebab akibat antara kebijakan publik dan administrasi. kepentingan umum.

Penelitian kebijakan publik tidak lepas dari tumbuhnya paradigma administrasi, karena perkembangan dan perkembangan ilmu kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu kebijakan publik yang berkaitan dengan ilmu politik, peran ilmu kebijakan publik dalam menjembatani kedua ilmu tersebut dapat digambarkan dengan mempelajari paradigma ilmu administrasi. Model kebijakan publik lebih mudah dipelajari ketika disarikan dari kenyataan, berbagai model juga digunakan dalam penelitian ilmu kebijakan publik, antara lain model konsekuensi dan dampak, dan model proses kebijakan publik.

Para ahli telah menemukan bahwa kebijakan publik memiliki arti yang sama. Artinya, semua strategi dan upaya pemerintah untuk membawa

perubahan atau menyelesaikan masalah yang muncul. Kebijakan publik di Indonesia dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan provinsi, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan gubernur prefektur, peraturan walikota, dll. B. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya Perda yang merupakan kebijakan pemerintah di tingkat daerah merupakan respon pemerintah terhadap pengelolaan sampah.

Kebijakan publik yang mempengaruhi perkembangan dalam dunia pemerintah saat ini juga sangat penting, sekarang Kota Surabaya juga memiliki berbagai kebijakan yang digunakan untuk mengatur tata kelolah pemerintah agar dapat berjalan dengan baik. masalah yang telah menjadi prioritas berusaha untuk didefinisikan serta dicarikan solusi atau alternatif kebijakan melalui pembahasan oleh para pembuat kebijakan. Alternatif kebijakan diharapkan dapat menguji masa depan yang secara normatif bernilai dan mengestimasi akibat dari kebijakan yang diusulkan serta mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi

dalam pencapaian tujuan. Dalam Yohan, (2021.) menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah publik terkait penanganan masalah sampah, maka para pembuat kebijakan/stake holder mengambil alternatif melalui pembahasan yang panjang, yaitu :Manajemen Tata Kelola Pembuangan dan pengangkutan sampah Membangun Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Membangun Bank Sampah

Data dikumpulkan dengan menggunakan informasi data dari bidang presentasi dan ditampilkan dalam teks deskriptif tanpa menambahkan fakta. Pemaparan ini dilakukan setelah kondisi lapangan dilonggarkan melalui wawancara dan observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya Mengenai pengelolaan sampah di Kota Surabaya, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurangan sampah di Kota Surabaya, membangun kota yang lebih bersih dan indah dengan menggunakan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di seluruh masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, seiring bertambahnya jumlah orang, jumlah sampah pun bertambah. Untuk mengatasi masalah tersebut, diterbitkanlah Perda

Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019. Peran terpenting dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagai salah satu cabang kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dengan mandat utama melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kebersihan dan lingkungan. Jadi. dari walikota.

Dua topik utama yang perlu mendapat perhatian bersama berdasarkan penelitian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 (Renstra dlh 2016-2021) dan isu-isu potensial dan strategis Kota Surabaya dapat dirumuskan dengan yaitu:

Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyusun instruksi untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengatur segala sesuatu sesuai dengan kegiatannya untuk melakukan pemberdayaan.

Bukti dari lapangan menunjukkan bahwa penjangkauan masyarakat semakin meningkat untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal terlibat secara mendalam dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan. Pengetahuan masyarakat dan kesadaran lingkungan sebagai dasar pengelolaan lingkungan merupakan upaya penting untuk menjaga keseimbangan sumber daya. (Dari Buku Adipura Dinas Lingkungan Hidup)

Pemerintah sebagai penggerak

Peran pemerintah sebagai penggerak adalah menggerakkan partisipasi masyarakat ketika terjadi hambatan dalam proses pembangunan guna mendorong dan mempertahankan momentum pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam memberikan bimbingan dan arahan yang terfokus dan efektif kepada masyarakat. Memberikan bimbingan biasanya dicapai melalui tim pekerja bimbingan atau entitas tertentu yang memberikan pelatihan.

Berlandaskan peningkatan peran serta masyarakat, maka kesadaran, pemahaman dan keterampilan para pelaku ekonomi meningkat dalam hal perijinan dan kepatuhan pengelolaan

lingkungan dalam kaitannya dengan pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. rendah. Untuk menilai tingkat kepatuhan pelaku atau kegiatan ekonomi, pemerintah harus memantau mereka terhadap catatan lingkungan. Dari kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap dokumen lingkungan berupa dokumen Amdal, UKL UPL sppl dan izin lingkungan, para pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan atau tidak melakukan pemantauan lingkungan secara harian.

Melaporkan kegiatan manajemen yang dijelaskan dalam dokumen lingkungan. Selain itu, ada juga pelaku ekonomi yang telah memenuhi beberapa komitmen lingkungan namun belum ditindaklanjuti, yaitu laporan tengah tahunan. Dari 60 perusahaan atau kegiatan yang diperiksa di Kota Surabaya, rata-rata terdapat beberapa perusahaan atau kegiatan yang dibatasi pengelolaan limbah cair, pengelolaan udara atau emisi, dan pengelolaan limbah B3. Dari hasil wawancara, kami mengetahui bahwa perusahaan dan kegiatan pada umumnya tidak menerapkan pengelolaan lingkungan. B. Pengelolaan limbah cair, pengelolaan

kualitas udara, pengelolaan limbah B3, dan pelaporan enam bulan sesuai persyaratan dokumen lingkungan hidup. Tugas yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki peran strategis dalam kaitannya dengan kebersihan dan lingkungan. Ini mencakup beberapa tugas dan fungsi oleh TUPOKSI yaitu, penyampaian layanan (Regulator), pemantauan dan pengendalian implementasi (Dinamisator) dan pembinaan implementasi (Dinamisator). Manajemen Layanan (Otoritas Pengawasan). Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki wilayah pelayanan seluas 326,8 km² dengan 31 kecamatan yang terbentang dari utara ke selatan. Volume sampah Kota Surabaya berdasarkan perhitungan berdasarkan jumlah penduduk 2.827.892 jiwa yang setara dengan 700 ton per hari, dengan 79% volume sampah diolah oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan sisanya 21% dikelola. Di Sini. Oleh pemerintah daerah. Jumlah sampah yang diolah oleh DLH adalah sebagai berikut: Sampah yang dihasilkan di berbagai wilayah Surabaya yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan dan kecamatannya mencapai 700 ton dalam 193

pendistribusian. 6 ton per hari. Saat ini, 213,95 ton sampah yang tidak diolah dibuang oleh badan publik dan swasta setiap hari.

Sampah yang telah diolah akan dibuang di beberapa TPS yang tersebar di Kota Surabaya. Jumlah TPS di Kota Surabaya adalah 306. Kota Surabaya. Berdasarkan ruang lingkup pelayanan jasa sanitasi dan lingkungan dalam pengelolaan sampah di atas, saya ingin mengetahui bagaimana pelayanan dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan pengumpulan sampah, penyuluhan sampah dan pembuangan sampah. Pengelolaan pelayanan ditugaskan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

KESIMPULAN

Salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul Peran Jasa Lingkungan dalam Pengelolaan dan Kebersihan Sampah di Kota Surabaya. Pertama adalah peran Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan terkait dengan pelayanan pengumpulan sampah dan pelayanan pengangkutan yang ada saat ini. Beberapa di antaranya belum terlayani dengan baik, namun sudah mampu membahagiakan masyarakat.

Selanjutnya, mengenai pengawasan dan pembinaan praktik Peran Jasa Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Dalam rangka memberikan pelayanan terkait dengan pelayanan pengangkutan dan pengumpulan sampah yang ada saat ini, beberapa pelayanan sudah dapat memuaskan masyarakat sekitar, namun belum semuanya terlayani dengan baik.

Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan masih dipandang kurang baik, terbukti dengan tanggapan dari pelapor dan petugas Dinas Lingkungan Hidup. Dimana diperlukan pengawasan dan pembinaan yang cukup untuk membantu masyarakat memahami dan memahami dampak yang dapat ditimbulkan oleh sampah.

Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperbaiki masalah pengelolaan sampah di Kota Surabaya. Saat ini sudah ada prakarsa pemerintah dengan prakarsa jasa lingkungan yang baik dengan mempertimbangkan keinginan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan dengan program 3R. Upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki masalah pembuangan sampah di Kota Surabaya. Saat ini sudah dilakukan upaya pemerintah dengan

inisiatif yang sangat baik dari jasa lingkungan, dengan memperhatikan keinginan untuk lebih meningkatkan kualitas yang baik dan yang bersih. Memperbaiki lingkungan yang terlihat melalui inisiatif jasa lingkungan sendiri dengan membangun tempat pembuangan sampah di daerah yang dianggap sangat padat sampah dan melakukan pengabdian masyarakat terkait pengelolaan sampah di masyarakat sekali atau dua kali sebulan.

Namun sebagai proses sosialisasi masih kurang memadai, dan berdasarkan observasi dan wawancara penulis bahkan ada yang kurang mengetahui sosialisasi pengelolaan sampah, sehingga dari segi proses sosialisasi masih belum terlaksana dengan maksimal. mungkin. yang menganggap belum optimalnya sosialisasi pengelolaan sampah.

REFERENSI

- Hadya, A. M. (2020). Peran Dinas Kebersihan dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah : Studi deskriptif di Desa Hegarsari 1 kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.
- Pradana, Z. L., & Nugroho, A. (2018). Efektivitas Pengelolaan Sampah Di

Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

Novum : Jurnal Hukum, 5(3), 200–207.

<https://doi.org/10.2674/NOVUM.V5I3>.

36071

Salmaa. (2021). Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian Menurut Ahli, Jenis-Jenis, dan Karakteristiknya. Deepublish.

Yohan, M. (2017). Analisis_Kebijakan_Penanganan_Sampah. 2021.